

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Indonesia telah menerbitkan Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No.27 September 2016 yang memaparkan dimana pertumbuhan perekonomian dunia yang masih belum menguat dan lemahnya komoditas global telah menimbulkan lambatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Keadaan tersebut berpengaruh terhadap melambatnya kinerja rumah tangga dan korporasi hampir di semua sektor. Kinerja korporasi yang menurun berdampak kepada permintaan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK), sehingga menyebabkan melambatnya pertumbuhan intermediasi perbankan. Akibat dari kondisi yang kurang baik tersebut akan berpengaruh terhadap turunnya pendapatan pemerintah dan keterbatasan ruang fiskal meningkat. Keterbatasan ruang fiskal pemerintah yang bersamaan dengan kebijakan bagi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk meningkatkan ukuran Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki pada tingkat prosentase tertentu yang berpengaruh terhadap penurunan DPK dan meningkatnya risiko pada bank tertentu.

Kajian Stabilitas Keuangan No.29 September 2017 yang memaparkan perkembangan perekonomian global dan domestik dalam keadaan cukup baik pada tahun 2017 yang membawa pengaruh baik terhadap stabilitas sistem keuangan, namun perkembangan ekonomi melalui jalur perdagangan masih relatif melambat seiring dengan rendahnya permintaan baik dari korporasi domestik, investor global, dan rumah tangga. Keadaan ekonomi Indonesia pada

triwulan I dan II pada 2017 tumbuh dengan stabil sebesar 5,01% (yoy), dibandingkan dengan triwulan IV 2016 sebesar 4,49% (yoy). Kinerja ekspor mengalami perlambatan pada triwulan II 2017 karena realisasi ekspor menufaktur yang menurun sejalan dengan lemahnya permintaan negara maju.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

persen, yoy

Komponen PDB Pengeluaran	2015	2016				2016	2017	
		I	II	III	IV		I	II
Konsumsi Rumah Tangga	4,96	4,97	5,07	5,01	4,99	5,01	4,94	4,95
Konsumsi Lembaga Nonprofit Melayani Rumah Tangga	-0,62	6,40	6,71	6,64	6,72	6,62	8,05	8,49
Konsumsi Pemerintah	5,32	3,43	6,23	-2,95	-4,05	-0,15	2,68	-1,93
Investasi	5,01	4,67	4,18	4,24	4,80	4,48	4,78	5,35
Investasi Bangunan	6,11	6,78	5,07	4,96	4,07	5,18	5,87	6,07
Investasi Nonbangunan	1,95	-1,20	1,70	2,16	7,07	2,45	1,49	3,27
Ekspor	-2,12	-3,29	-2,18	-5,65	4,24	-1,74	8,21	3,36
Impor	-6,41	-5,14	-3,20	-3,67	2,82	-2,27	5,12	0,55
PDB	4,88	4,92	5,18	5,01	4,94	5,02	5,01	5,01

Sumber: BPS

Sumber : Kajian Stabilitas Keuangan No.29 September 2017

Kondisi tersebut menimbulkan intermediasi yang melambat dan tingginya risiko kredit, namun perusahaan perbankan masih mampu menjaga kondisi kinerja dengan baik. Kondisi tersebut juga merupakan kontribusi tingginya tingkat permodalan dan likuiditas yang memadai. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mencerminkan tingkat kecukupan modal perbankan yang tercatat cukup tinggi sebesar 22,52% pada semester I 2017, meski menurun tipis dari 22,69% pada akhir 2016. Pada likuiditas perbankan tercermin pada Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) menunjukkan relatif terbatas sebesar 21,15% pada semester I 2017 dari 21,61% pada akhir 2016. Profitabilitas perbankan relatif terjaga, tercermin pada *Return On Assets* (ROA) meningkat sebesar 2,42% pada semester I 2017 dari 2,17% pada akhir 2016, yang seiring

dengan upaya menjaga margin keuntungan perbankan atau *Net Interest Margin* (NIM) yang masih stabil di tingkat 5,21% pada semester I 2017 meskipun menurun tipis dari 5,47% pada akhir 2016.

Tabel 1.2 Kinerja Perbankan Konvensional (%)

Indikator	Semester I 2016	Semester II 2016	Semester I 2017
Permodalan			
▼ CAR	22,56	22,69	22,52
Likuiditas			
▲ AL/NCD	97,40	99,36	101,26
▲ AL/DPK	20,35	21,61	21,15
Profitabilitas			
▲ ROA	2,26	2,17	2,42
▼ NIM	5,44	5,47	5,21
Intermediasi			
▲ DPK	5,90	9,60	10,30
▼ Kredit	8,89	7,86	7,75
Risiko Kredit			
▲ NPL <i>Gross</i>	3,24	2,93	2,96
Efisiensi			
▼ BOPO	82,80	82,85	79,48
▲ Naik ▼ Turun ■ Baik ■ Buruk			

Sumber : Kajian Stabilitas Keuangan No.29 September 2017

Efisiensi perbankan dalam kondisi yang membaik, tercermin dari Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 79,48% pada semester I 2017 dari 82,85% pada akhir 2016. Intermediasi DPK perbankan meningkat dari 9,60% di akhir tahun 2016 tumbuh sebesar 10,30% (yoy) pada semester I 2017. Pertumbuhan DPK ini merupakan kontribusi dari program *tax amnesty* dan ekspansi keuangan Pemerintah serta perlambatan penyaluran kredit perbankan. Pertumbuhan kredit melambat akibat rendahnya permintaan kredit yang tercatat sebesar 7,75% (yoy) pada semester I 2017 dari 7,86% pada akhir 2016. Rasio kredit tercermin pada rasio *Net Performing Loan* (NPL) secara historis masih cukup tinggi, pada semester I 2016 sebesar 3,24%

menurun menjadi 2,93% pada akhir 2016, kemudian meningkat tipis menjadi 2,96% pada akhir semester I 2017. Pertumbuhan kredit akan lebih baik pada tahun 2018, sejalan dengan perkiraan perbaikan ekonomi dan penerapan kebijakan makroprudensial terkait dengan intermediasi dan pengelolaan likuiditas, serta progress program konsolidasi korporasi dan perbankan yang ditempuh (Tinjauan Kebijakan Moneter, 2018)

Bank Indonesia (2016) menjaga stabilitas sistem keuangan merupakan tujuan yang memiliki kepentingan bersama antara beberapa otoritas. Masing – masing otoritas memiliki kewenangan yang berbeda – beda seperti Bank Sentral melalui kewenangan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran; pemerintah melalui kewenangan fiskal; dan otoritas pengawas industri jasa keuangan melalui kewenangan mikroprudensial.

European System Risk Board (2013) dalam Bank Indonesia (2016), ESRB yaitu badan yang memiliki misi mengawasi sistem keuangan Eropa, serta mencegah dan membatasi terjadinya risiko sistemik di sistem keuangan Eropa, Mendefinisikan kebijakan makroprudensial kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk dengan memperkuat ketahanan pertumbuhan ekonomi.

Implementasi kebijakan makroprudensial sangat mungkin dilakukan melalui interaksi yang bersifat saling melengkapi dengan kebijakan lain, terutama dengan kebijakan yang memiliki dampak pada sistem keuangan, sehingga menjadikan elemen sistem keuangan menjadi lebih berhati – hati (*prudent*) dan diharapkan agar permasalahan yang terjadi pada sistem keuangan tidak berdampak negatif pada kondisi makroekonomi dan sektor riil, serta sebaliknya.

Peraturan Bank Indonesia No.20/4/PBI/2018 menimbang bahwa Bank Indonesia turut berperan dalam stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan

dan pengawasan makroprudensial yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik serta mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, sehingga perlu dilakukan penguatan fungsi intermediasi dan pengendalian risiko melalui perumusan instrumen makroprudensial berbasis intermediasi dan likuiditas yang memperhatikan siklus perekonomian (*procyclicality*). Perumusan instrumen makroprudensial berbasis intermediasi dan likuiditas dilakukan melalui penyempurnaan pengaturan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas (PLM) bagi bank umum konvensional dan bank umum syariah, dan unit usaha syariah untuk mencegah serta mengurangi risiko sistemik dan perilaku bank yang *procyclical*. Perilaku bank yang *procyclical* mengikuti kondisi naik turunnya perekonomian, disaat kondisi ekonomi sedang baik, perbankan akan melakukan ekspansi dan meningkatkan perilaku ambil risiko, apabila kondisi perekonomian sedang menurun, perbankan akan menahan ekspansi dengan menahan peyaluran kredit.

Hasil penelitian Jariah (2013) yang berjudul “Analisis Suku Bunga Kredit dan Kualitas Pelayanan Serta Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah Pada BPR” menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan variabel suku bunga kredit terhadap loyalitas nasabah pada BPR. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila suku bunga kredit meningkat maka akan menurunkan loyalitas nasabah pada BPR atau sebaliknya, apabila suku bunga kredit menurun maka akan meningkatkan loyalitas nasabah pada BPR. Kesimpulan dari hasil tersebut bahwa tingkat suku bunga dan kualitas layanan bank yang diberikan oleh perbankan merupakan dasar untuk pertimbangan bagi masyarakat yang akan

berpengaruh terhadap loyalitas atau kepercayaan kepada bank dan profitabilitas pada bank.

Surat Edaran No.13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit menjelaskan bahwa Pemilihan produk bank oleh nasabah pada umumnya didasarkan pada pertimbangan mengenai manfaat, biaya, dan risiko dari produk yang ditawarkan oleh bank tersebut. Hal ini menjadi sangat relevan khususnya untuk produk utama perbankan yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas, sehingga transparansi informasi mengenai Suku Bunga Dasar Kredit (*Prime Lending Rate*) atau SBDK, sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah. SBDK sendiri merupakan suku bunga dasar yang paling rendah dimana bank belum menghitung risiko dari kredit tersebut.

Penerapan transparansi informasi SBDK merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *Good Governance* dan menjaga persaingan antar bank supaya tetap sehat sehingga OJK dan BI mengetahui bahwa tidak ada perbankan yang bermain curang dengan cara memperlmainkan suku bunga kredit sehingga terciptanya disiplin pasar (*market discipline*) yang lebih baik. Bank yang pada dan/atau setelah tanggal 28 Februari 2011 berdasarkan posisi Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) mempunyai total aset Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih wajib melakukan publikasi informasi SBDK dalam rupiah melalui papan pengumuman di setiap kantor bank, halaman utama *website* bank apabila bank memiliki *website*, dan surat kabar yang dilakukan bersamaan dengan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni,

September, dan Desember. Penelitian ini meneliti 18 perusahaan bank *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan penerbitan saham perdana (*Initial Public Offering - IPO*) pada akhir Desember 2014 - 2017. SBDK yang dipublikasikan terdiri dari Kredit Korporasi, Kredit Ritel, Kredit Mikro, Kredit Pemilik Rumah (KPR) dan Non Kredit Pemilik Rumah (non KPR). SBDK antar bank memiliki nilai yang berbeda – beda, seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Desember 2017

Nama Bank	Suku Bunga Dasar Kredit (%)				
	Korporasi	Ritel	Mikro	KPR	NONKPR
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	10,95	10,75	19,00	10,98	13,50
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	10,95	11,73	21,26	10,78	12,49
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	9,89	11,42	19,92	11,58	12,50
PT. Bank Maybank Indonesia Tbk	9,70	11,00	18,30	9,50	10,75
PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk	16,04	16,04	23,78	15,04	16,04
PT. Bank Capital Indonesia, Tbk	14,50	13,50	13,50	13,50	13,50
PT. Bank Bumi Arta, Tbk	11,67	12,23	18,23	11,70	16,23
PT. Bank J Trust Indonesia, Tbk.	12,00	12,50	26,00	13,50	12,50
PT. Bank Mayapada International, Tbk	13,00	13,10	23,20	13,40	13,30
PT. BPD Jawa Barat Dan Banten, Tbk	16,65	12,82	18,88	15,42	14,10
PT. BPD Jawa Timur, Tbk	12,32	13,70	14,93	8,94	11,42
PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk	13,50	15,00	13,00	15,00	14,50
PT. Bank Of India Indonesia, Tbk	13,25	13,25	13,25	15,00	13,25
PT. Bank QNB Indonesia, Tbk	11,00	12,00	13,25	13,50	13,75
PT. Bank Bukopin, Tbk	12,32	13,09	16,94	12,48	12,42
PT. Bank MNC Internasional, Tbk	13,84	13,74	16,01	14,11	14,61
PT. Bank Mitraniaga, Tbk	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51
PT. Bank Victoria International, Tbk	13,52	14,00	15,00	13,50	15,25

Sumber : www.ojk.go.id

Bank Indonesia (2016) mengenai Mengupas Kebijakan Makroprudensial menjelaskan kebijakan makroprudensial secara efektif bisa menjadi komplemen atau pelengkap dari kebijakan – kebijakan lain yang sudah ada sebelumnya. Karakteristik kebijakan makroprudensial yang berorientasi kepada sistem, mencakup dimensi runtun waktu (*time series*) dan antar subjek

(*cross section*), serta implementasikan dengan perangkat prudensial, diharapkan dapat menutup kekurangan (*gap*) kebijakan mikroprudensial moneter, maupun fiskal dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan mikroprudensial yang difokuskan pada tingkat individu institusi keuangan lebih ditekankan pada dimensi antar subjek (*cross section*), yakni bagaimana risiko teramplifikasi dalam 1 (satu) periode tertentu. Kesehatan institusi keuangan suatu waktu tidak mampu menggambarkan evolusi risiko yang ada pada institusi tersebut, karena kenyataannya pergerakan institusi keuangan cenderung sejalan dengan naik turunnya perekonomian yang menghiiasi perilaku ambil risikonya (*procyclicality*).

Bank Indonesia (2012) mengenai Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada PBI 13/1/PBI/2011 pasal 2 menjelaskan bahwa bank wajib memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati – hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Kesehatan Bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga. Tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank, baik berupa *corrective action* oleh bank maupun *supervisory* oleh Bank Indonesia.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan Metode RGEC singkatan dari *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital* yang menggantikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan Metode CAMELS yang terdiri dari *Capital, Assets Qu ality,*

Management, Earning, Liquidity, and Sensitivity to Market Risk. Permana (2012) dalam Maheswari & Suryanawa (2016) menyatakan bahwa Metode CAMELS tidak memberikan suatu simpulan yang mengarah satu penilaian atau membingungkan. Penilaian kesehatan menggunakan RGEC dianggap mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kesehatan perusahaan.

Bank Indonesia (2012) mengenai Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada PBI 13/1/PBI/2011 pasal 1 menjelaskan tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Kinerja bank merupakan hasil kinerja manajemen perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk menentukan efektifitas kondisi perusahaan yang dapat diukur menggunakan nilai perusahaan dengan berbagai metode sesuai dengan pandangan dalam memproksikan variabel yang diteliti. Mengukur kinerja perusahaan salah satunya dapat menggunakan Metode Tobin's Q.

Sudiyanto dan Puspitasari (2010) Tobin's Q merupakan indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukkan suatu proforma manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan. Rasio *Tobin's Q* merupakan rasio yang membandingkan nilai pasar perusahaan yang terdaftar di pasar keuangan dengan nilai buku total aset perusahaan. Maheswari dan Suryanawa (2016) menjelaskan bahwa nilai Rasio *Tobin's Q* diatas satu, menunjukkan investasi dalam aset untuk menghasilkan laba dengan nilai yang lebih tinggi dari pada pengeluaran investasi, sehingga dapat menarik para investor baru. Nilai rasio *Tobin's Q* dibawah satu, investasi dalam aset

untuk menghasilkan laba yang rendah sehingga tidak menarik para investor baru.

Penelitian terdahulu, Agustin (2014) dalam Maheswari dan Suryanawa (2016) menjelaskan kinerja bank yang baik akan memberikan peningkatan pada harga saham. Peningkatan harga saham akan memberikan pertanda kepada pasar bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan baik. Pendapat tersebut didukung oleh Pertiwi dan Pratama (2012) bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap *Tobin's Q* yang merupakan gambaran dari nilai perusahaan, sedangkan *Good Corporate Governance* bukanlah variabel yang memoderasi hubungan kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. Srihayati, Tandika dan Azib (2015) menyatakan bahwa kinerja keuangan perbankan CAR, NPL, BOPO, LDR dan NIM terhadap nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dalam perbankan tersebut, dengan mengambil judul “Pengaruh Kebijakan Makroprudensial, Suku Bunga Dasar Kredit, Dan Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Bank Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2017”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada pula munculnya rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kebijakan Makroprudensial (X_1) berpengaruh terhadap Kinerja Bank (Y) di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2017?

2. Apakah Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (X_2) berpengaruh terhadap Kinerja Bank (Y) di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2017?
3. Apakah Kesehatan Bank dengan menggunakan Metode RGEC (X_3) berpengaruh terhadap Kinerja Bank (Y) di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2017?
4. Apakah Kebijakan Makroprudensial (X_1), Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (X_2), dan Kesehatan Bank (X_3) dengan menggunakan Metode RGEC (X_3) berpengaruh secara bersama – sama terhadap Kinerja Bank (Y) di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dan diketahui dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kebijakan Makroprudensial (X_1) berpengaruh atau tidak terhadap Kinerja Bank (Y) di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2017.
2. Untuk mengetahui Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (X_2) berpengaruh atau tidak terhadap Kinerja Bank (Y) di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2017.
3. Untuk mengetahui Kesehatan Bank dengan menggunakan Metode RGEC (X_3) berpengaruh atau tidak terhadap Kinerja Bank (Y) di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2017.
4. Untuk mengetahui Kebijakan Makroprudensial (X_1), Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (X_2), dan Kesehatan Bank dengan menggunakan Metode RGEC (X_3) berpengaruh atau tidak secara bersama – sama terhadap Kinerja Bank (Y) di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2017.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Manfaat yang diharapkan adalah memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dunia perbankan dalam pengaruh kebijakan makroprudensial, suku bunga dasar kredit, dan kesehatan bank terhadap kinerja perusahaan pada bank. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian sidang Sarjana Program Studi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya.

2. Bagi Pengambil Kebijakan

Manfaat yang diharapkan mampu memberikan informasi untuk perusahaan dan investor mengenai kebijakan atau keputusan dalam hal menilai kinerja perusahaan melalui ekuitas (saham yang dimiliki) khususnya pada subsektor perbankan.

3. Bagi Akademi

Manfaat yang diharapkan mampu memberikan rujukan atau acuan peneliti selanjutnya dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa tentang kebijakan makroprudensial, suku bunga dasar kredit, dan kesehatan bank terhadap kinerja perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini disusun berdasarkan sistematika dan secara keseluruhan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Kajian Pustaka berisi teori – teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, terdapat penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis

BAB III Metode Penelitian menjelaskan tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengolahan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian tentang gambaran umum objek dan subjek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V Penutup berisi tentang uraian tentang simpulan dan saran yang didapat dari penelitian atau analisa, serta memberikan saran yang diperlukan untuk bahan pertimbangan perusahaan dalam kebijakan dan keputusan selanjutnya.